

Effectiveness of the E-Government Online Promotion System (SIPEKAT) in the Sidoarjo Regency Public Works, Highways, and Water Resources Agency

[Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo]

Sari Rejo¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to describe and analyze the effectiveness of the online-based promotion system (SIPEKAT) an e-government initiative at the Public Works, Highways, and Water Resources Agency of Sidoarjo Regency. The study employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation at the agency's offices. Informants included the Head of the General Affairs and Personnel Division, SIPEKAT operators, and civil servants (ASN) within the agency. The results indicate that regarding the first indicator goal achievement SIPEKAT has facilitated faster, more effective, and efficient promotion services with improved administrative orderliness, although it is not yet integrated with other personnel systems. Secondly, regarding the integration indicator, communication and coordination between the Sidoarjo Regency Regional Personnel Agency and the Public Works, Highways, and Water Resources Agency have been conducted via official notifications or circulars; however, information regarding SIPEKAT updates has not been comprehensively disseminated to all civil servants. Thirdly, regarding the adaptation indicator, operators have successfully adapted to using SIPEKAT, supported by adequate facilities and infrastructure; nevertheless, there remains a lack of uniform understanding and participation among civil servants regarding the system's use.*

Keywords - Effectiveness; E-government; SIPEKAT

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Operator Sipekat, ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pertama, pencapaian tujuan, SIPEKAT telah mendukung pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi, meskipun belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian lainnya. Kedua, pada indikator integrasi, komunikasi dan koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan melalui surat pemberitahuan atau surat edaran, namun sosialisasi pembaruan SIPEKAT belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh ASN. Ketiga, pada indikator adaptasi, operator telah mampu menyesuaikan diri dengan penggunaan SIPEKAT serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun masih terdapat ASN yang belum memiliki pemahaman dan partisipasi yang merata dalam penggunaan SIPEKAT.*

Kata Kunci - Efektivitas; E-government; SIPEKAT

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor. Perkembangan manajemen teknologi mengalami pertumbuhan pesat selama 20 tahun terakhir Inovasi teknologi sebagai kunci untuk kemajuan dan daya saing organisasi [1]. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi telah mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk dalam bidang administrasi kepegawaian [2]. Upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang baik tentunya tidak terlepas dari peran Aparatur Negara sebagai penyelenggaranya. Peran Aparatur Negara merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang

berkualitas. Untuk itu, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sosok SDM aparatur (PNS) yang profesional, yang mempunyai perilaku sikap yang taat, disiplin, bermoral dan bermental baik serta akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pemberi layanan publik yang baik. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang kepegawaian wilayah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian salah satunya yaitu pengusulan kenaikan pangkat ASN secara optimal dalam upaya mewujudkan SDM aparatur yang profesional.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor. Perkembangan manajemen teknologi mengalami pertumbuhan pesat selama 20 tahun terakhir Inovasi teknologi sebagai kunci untuk kemajuan dan daya saing organisasi. Strategi teknologi yang dirancang untuk mengelola sumber daya dan kapabilitas teknologi secara efektif. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia di tempat kerja, terutama melalui pemantauan dan evaluasi kinerja secara sistematis. Hal ini juga termasuk dalam sistem manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, manajemen kinerja ASN merupakan konsep manajemen publik baru yang berfokus pada orientasi hasil, transparansi, dan akuntabilitas layanan administrasi. Dalam konteks manajemen aparatur sipil negara (ASN), teknologi informasi diharapkan mampu menjawab tantangan birokrasi yang kompleks dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi ASN secara optimal [3]. Salah satu aspek penting dalam manajemen ASN adalah kenaikan pangkat. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan optimalisasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi yang tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja, tetapi juga menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai [4]. Indikator terkait kinerja sangat penting untuk mengevaluasi dan memperkirakan kinerja, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, dan menetapkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan [5].

Pangkat ialah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasar jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Namun demikian, proses kenaikan pangkat masih kerap dihadapkan pada berbagai persoalan administratif, mulai dari keterlambatan berkas, kurangnya pemahaman terhadap prosedur, hingga keterbatasan sarana pendukung. Persoalan-persoalan tersebut berakibat pada lambatnya proses pelayanan serta menurunkan kualitas tata kelola kepegawaian [6].

Administrasi kepegawaian, khususnya pelayanan kenaikan pangkat ASN, menjadi salah satu layanan strategis yang berdampak langsung terhadap motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil [7]. Kenaikan pangkat tidak hanya berimplikasi pada peningkatan status dan penghasilan ASN, tetapi juga mencerminkan pengakuan atas kompetensi dan kontribusi pegawai terhadap organisasi [8]. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment. Sebagai bentuk inovasi dalam menyikapi permasalahan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menerapkan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT), sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mempercepat proses kenaikan pangkat secara digital dan paperless. SIPEKAT merupakan suatu sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh semua OPD, berfungsi sebagai alat komunikasi antara BKD dan OPD dalam proses pengurusan Kenaikan Pangkat. Melalui SIPEKAT ini terbangun sebuah mekanisme komunikasi kolaborasi, dan pertukaran informasi dalam proses Kenaikan Pangkat serta mempermudah dalam pengiriman berkas-berkas dengan cara *online*. SIPEKAT mulai diimplementasikan oleh BKD Sidoarjo pada bulan November 2015 untuk usulan kenaikan pangkat periode 1 April 2016. Berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor: 800/307/404.6.1/2015 Tentang SIPEKAT dengan adanya sistem ini dapat memangkas alur layanan kepegawaian dan proses tatap muka antara admin atau staf di Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Pensiun dengan pihak yang berkepentingan menjadi berkurang sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya praktek pungutan liar dan juga KKN.

Melalui penerapan SIPEKAT, proses pengusulan hingga penetapan kenaikan pangkat dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Sistem ini mendukung penyederhanaan proses administrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan pengajuan. Dengan adanya SIPEKAT, data dan dokumen pengusulan dapat dikelola secara lebih sistematis sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penginputan maupun kelengkapan administrasi. Selain itu, penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepegawaian, mempercepat waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat, serta memberikan kemudahan bagi ASN dalam memantau proses pengusulannya. Dengan demikian, SIPEKAT tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi kenaikan pangkat, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Berikut merupakan dokumentasi laman awal SIPEKAT Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2026

Gambar 1. Laman Awal SIPEKAT Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa pada laman awal SIPEKAT terdapat username dan password untuk di akses. SIPEKAT diakses oleh OPD di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dalam memproses kenaikan pangkat secara online. Sebelum adanya SIPEKAT, dalam memproses kenaikan pangkat ASN Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan cara manual. SIPEKAT telah diluncurkan oleh BKD Sidoarjo sejak November 2015 untuk usulan promosi selama 1 April 2016. Dalam SIPEKAT terdapat beberapa layanan yaitu layanan kenaikan pangkat, layanan pensiun, layanan kenaikan gaji berkala, layanan mutasi dan pindah, layanan cuti ASN, dan Layanan Pendidikan dan gelar. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu OPD yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan SIPEKAT dalam memproses kenaikan pangkat ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Pada observasi awal, Berikut merupakan data ASN yang telah mengajukan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT mulai tahun 2023-2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Pengajuan Kenaikan Pangkat melalui SIPEKAT pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Jumlah	Pangkat	Keterangan
1	2023	33 Orang	Penata TK.I / (III/d), Pengatur / (II/c), Pengatur Muda / (III/a)	Terproses
2	2024	25 Orang	Penata TK.I / (III/d), Pembina / (IV/a), Penata Muda / (III/a), Pengatur / (II/c), Pengatur Muda / (II/a)	Terproses
3	2025	9 Orang	Pembina / (IV/a), Penata Muda / (III/a), Pengatur / (II/c), Pengatur Muda / (II/a), Penata Muda Tk.I / (III/b)	Terproses
Total		67 Orang		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2026

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pengajuan kenaikan pangkat bagi ASN melalui SIPEKAT dimulai pada tahun 2023 hingga saat ini. Semua pengajuan kenaikan pangkat yang diajukan setiap tahun telah terproses sesuai dengan SOP yang ada. Dalam melakukan proses pengajuan kenaikan pangkat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo di bantu oleh operator yang sudah di tunjuk dalam mengoperasikan SIPEKAT. Sehingga tidak semua ASN masing-masing mengajukan melalui SIPEKAT secara mandiri. Selain itu, dari tabel 1 diatas juga dapat diketahui bahwa jumlah ASN yang mengajukan kenaikan pangkat mengalami penurunan dikarenakan beberapa hal antara lain masih belum memenuhi ketentuan pengajuan kenaikan pangkat. Penulis menjumpai bahwa masih dijumpai beberapa permasalahan. Pertama, terkait keterbatasan SDM yang dapat mempengaruhi rendahnya partisipasi dan pemahaman dalam penggunaan SIPEKAT. Kedua, Belum optimalnya integrasi sistem antara SIPEKAT dengan sistem kepegawaian lain. Ketiga, sosialisasi setiap pembaharuan sistem belum menyeluruh sehingga masih terdapat ASN belum memahami perubahan-perubahan yang ada pada sistem ketika memproses kenaikan pangkat

Dalam mengkaji terkait Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo keberadaan teori sangat diperlukan sehingga dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut M. Richard Strees, sebagai berikut yakni a) Pencapaian Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal. Tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. b) Integrasi pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan consensus di tengah masyarakat, dan c) Adaptasi kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan. Dengan demikian, digunakan tolak ukur berupa kesediaan petugas dan sarana prasarana [9].

Berdasarkan permasalahan diatas mengai Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Penelitian terdahulu juga dijumpai permasalahan yang sama terkait Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Pertama, penelitian terdahulu oleh Suherman, tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tabalong” dijumpai hasil faktor yang menjadi kendala pada pelayanan kenaikan pangkat di BKPP Tabalong yaitu Pengelola Kepegawaian SKPD mengabaikan surat pemberitahuan usul pangkat khususnya jadwal pengusulan dan syarat yang diminta, kurang teliti dalam pemeriksaan berkas baik dari pihak pemberi layanan dan juga dari pihak Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat, kurangnya kelengkapan berkas dari pihak Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat [10].

Kedua, penelitian terdahulu oleh Ahmad Farhan Dwi Sestono, tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur” dijumpai hasil Efektivitas Layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan cukup efektif baik dalam dimensi struktur organisasi, dukungan aparatur serta pimpinan. Akan tetapi dalam dimensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dialami dalam Efektivitas layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yaitu Kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi yang masih kurang, Masih kurangnya pihak penyedia layanan SIPEKAT dan Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Upaya yang dilakukan BKD adalah Memberikan Sosialisasi dan Bimbingan terkait penggunaan SIPEKAT, Pemberian insentif kepada pihak penyedia layanan SIPEKAT, Perbaikan Sarana dan Prasarana [11].

Ketiga, penelitian oleh Mayyasya Tian Ramadyanti dan Ilmi Usrotin Choiriyah, tahun 2025 berjudul “Efektivitas E-Government melalui Surat Izin Praktik Online (SIP Online) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem SIP Online telah berhasil menjangkau sasaran utama, yaitu tenaga kesehatan yang diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik. Pertama, layanan SIP Online telah menjangkau seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun masih menghadapi kendala literasi digital, terutamanya tenaga kesehatan lanjut usia. Kedua, sosialisasi sudah dilakukan secara daring dan luring, tetapi belum rutin dan belum merata menjangkau seluruh sasaran. Ketiga, dari segi efisiensi, waktu pelayanan berhasil dipangkas dari 14 hari menjadi 7 hari, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterlambatan penandatanganan manual dan pengajuan izin yang mendekati masa berlaku habis. Keempat, pemantauan dan evaluasi belum dilaksanakan secara rutin dan terstruktur, sehingga hasilnya belum dapat digunakan sebagai dasar perbaikan [12]. Tujuan dari penelitian saat ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar ilmiah [13]. Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada penelitian dengan tujuan guna memahami gejala dan fenomena serta komprehensif yang dialami oleh subjek penelitian terhadap beberapa persoalan seperti tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya dengan menggunakan deskripsi sebagai penjelasannya. Lokasi Penelitian yaitu dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih sampel dengan berlandaskan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini atau disebut dengan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian saat ini

yakni serta Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Operator SIPEKAT, ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen Fokus dalam penelitian Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari Miles dan Huberman, teknis analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian. Miles dan Huberman membagi proses analisis data menjadi empat langkah yakni 1) Pengumpulan Data, yakni proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. 2) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 3) Penyajian data, yakni pengumpulan data yang tersusun dan memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. 4) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan menyimpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan pada pendahuluan [14].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan serta berbagai dokumen pendukung, penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi SIPEKAT menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu (1) pencapaian tujuan, (2) integrasi, dan (3) adaptasi, untuk mengetahui sejauh mana penerapan SIPEKAT mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kenaikan pangkat secara elektronik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

A. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keadaan atau hasil yang hendak dicapai oleh individu maupun kelompok melalui pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Pencapaian tujuan menggambarkan kondisi yang diharapkan sebagai bentuk pencapaian atas nilai, kebutuhan, dan harapan para pelaksana. Selain itu, pencapaian tujuan berperan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian berbagai program dan kegiatan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Dalam suatu program, kejelasan pencapaian tujuan memiliki peranan yang sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan program dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan mampu direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Efektivitas memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan proses yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran program secara bertahap, baik melalui penyelesaian setiap tahapan kegiatan maupun berdasarkan periodisasi pelaksanaan yang telah direncanakan [15]. Dalam penelitian ini, pencapaian tujuan implementasi Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dinilai dari kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wilga Lazul Nuviantra, S.IP., M.HO selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“SIPEKAT merupakan sistem kenaikan pangkat berbasis online yang dikembangkan dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo sebagai media pengajuan usulan kenaikan pangkat ASN. Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, kami memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengajukan usulan kenaikan pangkat secara elektronik sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, lebih tertib administrasi, serta memudahkan pegawai dalam melengkapi dan memantau persyaratan yang dibutuhkan. Dengan adanya SIPEKAT dari BKD ini, koordinasi antara OPD dengan BKD juga menjadi lebih efektif karena seluruh dokumen dan tahapan pengajuan sudah terintegrasi dalam satu sistem.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Anita Farida selaku Operator SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Sebagai operator SIPEKAT, kami mengelola seluruh proses pengajuan kenaikan pangkat ASN melalui sistem yang disediakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo. Dibandingkan dengan proses manual, penggunaan SIPEKAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

~ ALUR KENAIKAN PANGKAT ONLINE ~



Gambar 2. Flowchart SIPEKAT

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa setiap ASN yang akan mengajukan kenaikan pangkat wajib menunggah persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Meskipun SIPEKAT telah memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kenaikan pangkat secara elektronik, implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya integrasi dengan sistem kepegawaian lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terkait Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo pada indikator pencapaian tujuan telah mampu mewujudkan pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi. Digitalisasi proses pengajuan memudahkan ASN dalam mengajukan usulan, memantau status berkas, serta meningkatkan koordinasi antara OPD dengan BKD Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya optimal karena SIPEKAT belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian lainnya, sehingga ASN dan operator masih harus mengunggah kembali dokumen kepegawaian yang sebenarnya telah tersedia pada sistem lain. Temuan tersebut sejalan dengan teori efektivitas M. Richard Steers yang menyatakan bahwa efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan program yang telah direncanakan dapat dicapai dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, implementasi SIPEKAT dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi tujuan utama program, meskipun masih memerlukan penyempurnaan melalui integrasi antar sistem kepegawaian. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Suherman (2022) yang menyimpulkan bahwa pelayanan kenaikan pangkat berbasis elektronik mampu meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan, namun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh optimalisasi sistem pendukung yang digunakan.

B. Integrasi

Integrasi merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam membangun sosialisasi, menjalin komunikasi yang efektif, serta mengembangkan kesepahaman atau konsensus di tengah masyarakat. Melalui integrasi yang baik, organisasi dapat menciptakan koordinasi yang harmonis dengan berbagai pihak sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan [16]. Pada penelitian mengenai Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, indikator integrasi ditinjau dari pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi antara BKD Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola SIPEKAT dengan OPD sebagai pengguna sistem. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar ASN dan operator memahami prosedur, persyaratan, serta setiap pembaruan pada SIPEKAT sehingga proses pengajuan kenaikan pangkat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, integrasi juga berkaitan dengan keterhubungan SIPEKAT dengan sistem kepegawaian lainnya untuk mendukung pertukaran data secara otomatis, sehingga pelayanan kenaikan pangkat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akurat.

Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti rapat, koordinasi, maupun bentuk komunikasi lainnya yang melibatkan para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi tidak selalu berjalan secara optimal. Pada beberapa program, masih terdapat kendala karena sasaran program belum sepenuhnya memahami tujuan, mekanisme, maupun manfaat dari program yang dilaksanakan, sehingga efektivitas pelaksanaan program belum dapat tercapai secara maksimal [17]. Integrasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam membangun sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian mengenai Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, integrasi tercermin dari kemampuan BKD Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola SIPEKAT dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan OPD, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta ASN sebagai pengguna sistem. Selain itu, integrasi juga diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi mengenai prosedur, persyaratan, dan pembaruan SIPEKAT agar seluruh pengguna memiliki pemahaman yang sama dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Integrasi yang baik akan meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperkuat pemahaman pengguna terhadap sistem, serta mendukung tercapainya tujuan implementasi SIPEKAT dalam memberikan pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wilga Lazul Nuviandra, S.IP., M.HO selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“sosialisasi sendiri tidak dilakukan secara terjadwal atau saat ada perubahan atau peningkatan kualitas sistem. Biasanya, apabila memasuki periode usulan kenaikan pangkat, BKD akan menyampaikan surat pemberitahuan atau surat edaran kepada seluruh OPD mengenai jadwal, batas waktu pengajuan, serta ketentuan yang harus dipenuhi. Yang kami dahulukan yaitu ASN yang saat periode tersebut mengajukan pasti kami beri info sesuai dengan edaran yang kami dapat. Sehingga informasi tersebut diketahui hanya bebrapa ASN saja tidak keseluruhan.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Achmad Fauzi Makharim, A.Jd Selaku ASN di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“selama saya mengajukan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT, saya belum pernah mengikuti sosialisasi khusus mengenai penggunaan sistem atau perubahan yang ada di dalamnya. Informasi yang saya terima biasanya berasal dari bagian kepegawaian setelah mereka mendapatkan surat edaran dari BKD terkait jadwal, batas waktu pengajuan, maupun persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi, informasi tersebut hanya disampaikan kepada ASN yang sedang mengajukan kenaikan pangkat pada periode itu..” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa aspek integrasi, khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi SIPEKAT tidak dilakukan secara terjadwal maupun setiap terjadi perubahan sistem, melainkan informasi hanya disampaikan melalui surat edaran dari BKD kepada OPD khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menjelang periode kenaikan pangkat. Selanjutnya, informasi tersebut hanya diteruskan kepada ASN yang sedang mengajukan kenaikan pangkat pada periode tersebut, sehingga belum seluruh ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo memperoleh informasi mengenai perubahan persyaratan maupun mekanisme SIPEKAT. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi dan penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh ASN memiliki pemahaman yang sama terhadap penggunaan SIPEKAT. Penyebaran informasi mengenai perubahan persyaratan maupun mekanisme pengajuan kenaikan pangkat masih bergantung pada masing-masing OPD dalam meneruskannya kepada ASN. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan melalui surat edaran, tetapi aspek sosialisasi kepada seluruh ASN masih belum optimal sehingga berpotensi menyebabkan tidak semua ASN memperoleh informasi mengenai pembaruan SIPEKAT secara menyeluruh. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Anita Farida Selaku Operator SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Setiap memasuki periode usulan kenaikan pangkat, BKD Kabupaten Sidoarjo selalu menyampaikan surat pemberitahuan atau surat edaran kepada seluruh OPD. Jadi, surat edaran menjadi acuan kami dalam memproses usulan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT. Namun, penyampaian informasi tersebut lebih bersifat administratif dan belum disertai sosialisasi secara langsung kepada seluruh ASN. Selanjutnya, masing-masing OPD menyesuaikan cara menyampaikan informasi tersebut kepada pegawainya, sehingga tidak semua ASN memperoleh informasi mengenai perubahan persyaratan atau mekanisme SIPEKAT secara bersamaan.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai kenaikan pangkat melalui SIPEKAT sudah dilakukan melalui surat edaran kepada seluruh OPD. Namun, komunikasi belum sepenuhnya optimal karena belum disertai sosialisasi secara langsung kepada seluruh ASN. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai perubahan persyaratan dan mekanisme SIPEKAT belum diterima secara merata dan bersamaan oleh seluruh ASN. Berikut merupakan dokumentasi edaran terkait batas waktu kenaikan pangkat sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2026
Gambar 3. Dokumentasi Edaran Terkait Batas Waktu Kenaikan Pangkat

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa BKD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan kenaikan pangkat melalui surat pemberitahuan kepada seluruh perangkat daerah setiap memasuki periode usulan kenaikan pangkat. Surat edaran tersebut memuat jadwal pengajuan, batas waktu penyampaian usulan, serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, surat edaran menjadi media utama dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaan SIPEKAT kepada seluruh OPD. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, indikator integrasi dalam efektivitas SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara BKD Kabupaten Sidoarjo dengan OPD telah berjalan melalui penyampaian surat pemberitahuan atau surat edaran pada setiap periode kenaikan pangkat. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan proses pengajuan kenaikan pangkat sesuai jadwal, batas waktu, dan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun demikian, aspek sosialisasi belum terlaksana secara optimal karena tidak dilakukan secara terjadwal maupun setiap terjadi pembaruan sistem. Akibatnya, informasi mengenai perubahan persyaratan atau mekanisme SIPEKAT hanya disampaikan kepada ASN yang sedang mengajukan kenaikan pangkat, sehingga belum seluruh ASN memperoleh pemahaman yang sama mengenai penggunaan SIPEKAT. Temuan tersebut menunjukkan bahwa indikator integrasi menurut M. Richard Steers belum sepenuhnya terpenuhi. Steers menyatakan bahwa efektivitas organisasi diukur dari kemampuannya membangun sosialisasi, komunikasi, dan pengembangan konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat. Pada implementasi SIPEKAT, komunikasi dan koordinasi telah terlaksana melalui surat edaran, namun sosialisasi yang belum menyeluruh menyebabkan penyebaran informasi belum optimal. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ahmad Farhan Dwi Sestono (2023) yang berjudul "Efektivitas Layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur", yang menyimpulkan bahwa SIPEKAT telah memberikan kemudahan dalam pelayanan kenaikan pangkat, tetapi efektivitasnya masih memerlukan peningkatan, terutama pada aspek komunikasi,

C. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi maupun individu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks implementasi suatu sistem informasi, adaptasi tercermin dari kemampuan pegawai untuk memahami, mempelajari, dan mengoperasikan sistem yang diterapkan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam penelitian mengenai Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, indikator adaptasi digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan penerapan SIPEKAT sebagai sistem pelayanan kenaikan pangkat secara elektronik. Adaptasi tersebut ditinjau dari kemampuan ASN dan operator dalam menggunakan aplikasi SIPEKAT, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti komputer dan jaringan internet, serta kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan prosedur pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital. Implementasi SIPEKAT dapat dikatakan efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan sistem serta didukung dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai, sehingga pelayanan kenaikan pangkat dapat berlangsung secara lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wilga Lazul Nuviantra, S.I.P., M.HO Selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Sejak diterapkannya SIPEKAT, kami harus menyesuaikan proses pengajuan kenaikan pangkat yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis online. Operator maupun ASN dituntut untuk memahami cara penggunaan aplikasi agar proses pengajuan dapat berjalan dengan baik. Dari sisi sarana dan prasarana, kami telah didukung dengan komputer dan jaringan internet yang memadai sehingga pelaksanaan SIPEKAT dapat berjalan dengan lancar. Meskipun pada awal penerapan memerlukan penyesuaian, saat ini operator sudah terbiasa menggunakan SIPEKAT dalam setiap periode kenaikan pangkat sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan tertib administrasi.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Anita Farida Selaku Operator SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Pada awal penggunaan SIPEKAT memang diperlukan proses belajar karena mekanisme pengajuan berubah dari manual menjadi online. Namun, seiring berjalannya waktu kami sudah memahami alur penggunaan aplikasi, mulai dari mengunggah dokumen, melakukan verifikasi, hingga memantau status usulan. Dari sisi fasilitas juga sudah cukup mendukung karena tersedia komputer dan akses internet, sehingga kami dapat

mengoperasikan SIPEKAT dengan baik dalam melayani pengajuan kenaikan pangkat ASN.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam efektivitas SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dapat ditunjukkan oleh kemampuan operator dan ASN dalam menyesuaikan diri dengan perubahan proses pengajuan kenaikan pangkat dari sistem manual menjadi berbasis online. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana, seperti komputer dan jaringan internet, turut mendukung kelancaran pelaksanaan SIPEKAT. Dengan adanya kemampuan adaptasi sumber daya manusia dan dukungan fasilitas yang memadai, proses pelayanan kenaikan pangkat dapat dilaksanakan secara lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo beradaptasi dan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terkendala dalam masih rendahnya rendahnya partisipasi dan pemahaman dalam penggunaan SIPEKAT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wilga Lazul Nuviandra, S.IP., M.HO Selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Kendala yang masih kami hadapi dalam penerapan SIPEKAT adalah tingkat partisipasi dan pemahaman sebagian ASN terhadap penggunaan sistem yang belum merata. Masih ada pegawai yang belum memahami tahapan pengajuan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT maupun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengajuan memerlukan penjelasan dan pendampingan lebih lanjut dari pengelola kepegawaian. Sekalipun kami telah memberikan informasi terkait kekurangan dokumen, kadang ASN tersebut juga kurang memahami sehingga dapat menghambat proses verifikasi selanjutnya.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Anita Farida Selaku Operator SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan SIPEKAT, kendala yang masih sering kami temui adalah belum meratanya pemahaman ASN terhadap mekanisme pengajuan kenaikan pangkat. Beberapa ASN masih mengalami kesulitan dalam memahami tahapan proses maupun kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Meskipun kami sudah memberikan informasi mengenai dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi, masih ada ASN yang belum sepenuhnya memahami penjelasan tersebut sehingga proses verifikasi dan tindak lanjut pengajuan menjadi membutuhkan waktu lebih lama.” (Wawancara, 15 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan SIPEKAT masih menghadapi kendala pada pemahaman ASN yang belum merata terhadap mekanisme pengajuan kenaikan pangkat dan kelengkapan dokumen. Kondisi tersebut membuat operator perlu memberikan pendampingan dan penjelasan tambahan. Akibatnya, proses verifikasi dan tindak lanjut pengajuan kenaikan pangkat terkadang membutuhkan waktu lebih lama. Berikut merupakan tabel sarana dan prasarana pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 2. Sarana dan Prasarana pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo

| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Kondisi |
|-----|----------------------|--------|---------|
| 1. | Perangkat Komputer | 4 unit | Baik |
| 2. | Laptop | 2 unit | Baik |
| 3. | Jaringan Wifi | 1 unit | Baik |
| 4. | Printer | 3 unit | Baik |
| 5. | Scanner | 4 unit | Baik |
| 6. | Hard Disk | 2 unit | Baik |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2026

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana menunjang kebutuhan SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah memiliki berbagai perangkat yang dapat

menunjang kebutuhan proses pengajuan kenaikan pangkat melalui SIPEKAT. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, pada indikator adaptasi dalam efektivitas SIPEKAT di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan proses pelayanan kenaikan pangkat dari sistem manual menjadi berbasis elektronik. Hal tersebut ditunjukkan melalui kesiapan operator dan pengelola kepegawaian dalam memahami alur penggunaan SIPEKAT, mulai dari proses pengunggahan dokumen, verifikasi, hingga pemantauan status usulan. Selain itu, organisasi juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran operasional SIPEKAT. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan digitalisasi pelayanan kepegawaian yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi belum sepenuhnya optimal. Meskipun petugas telah mampu menyesuaikan diri dengan implementasi SIPEKAT dan didukung oleh fasilitas yang memadai, masih terdapat kendala berupa belum meratanya partisipasi dan pemahaman ASN terhadap mekanisme penggunaan SIPEKAT. Temuan tersebut sejalan dengan teori efektivitas organisasi menurut M. Richard Steers dimana petugas telah mampu mengoperasikan SIPEKAT dan organisasi telah menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai. Akan tetapi, masih adanya ASN yang belum memahami penggunaan SIPEKAT menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi organisasi belum sepenuhnya optimal karena proses penyesuaian terhadap perubahan sistem digital masih berlangsung di tingkat pengguna layanan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mayyasya Tian Ramadyanti dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2025) yang berjudul "Efektivitas E-Government melalui Surat Izin Praktik Online (SIP Online) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi e-government pada indikator adaptasi dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tersedianya sarana prasarana pendukung dalam mengoperasikan sistem berbasis elektronik. Meskipun infrastruktur teknologi telah tersedia dengan baik, keberhasilan implementasi sistem tetap bergantung pada kemampuan pengguna dalam memahami mekanisme pelayanan digital yang diterapkan.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian ditemukan hasil sebagai berikut : pertama, Pada indikator pencapaian tujuan, implementasi SIPEKAT telah mampu mendukung terwujudnya pelayanan kenaikan pangkat yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi. Pengajuan kenaikan pangkat yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah proses pengunggahan dokumen, pemantauan status usulan. Meskipun demikian, SIPEKAT belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian lainnya. Akibatnya, dokumen kepegawaian yang sebenarnya telah tersedia pada sistem lain masih harus diunduh dan diunggah kembali ke dalam SIPEKAT, sehingga proses administrasi masih memerlukan pekerjaan yang berulang. Kedua, Pada indikator integrasi, komunikasi dan koordinasi antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah berjalan melalui penyampaian surat pemberitahuan atau surat edaran pada setiap periode kenaikan pangkat. Surat edaran tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengajuan kenaikan pangkat sesuai dengan jadwal, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh maupun secara berkala setiap terdapat pembaruan sistem. Informasi mengenai perubahan mekanisme dan persyaratan SIPEKAT umumnya hanya disampaikan kepada ASN yang sedang mengajukan kenaikan pangkat pada periode tertentu, sehingga masih terdapat ASN yang belum memperoleh informasi secara merata mengenai perkembangan sistem. Ketiga, Pada indikator adaptasi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap penerapan SIPEKAT sebagai sistem pelayanan kenaikan pangkat berbasis elektronik. Hal tersebut ditunjukkan melalui kesiapan operator dalam mengoperasikan aplikasi serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Meskipun demikian, kemampuan adaptasi masih terdapat kendala ASN yang belum memiliki pemahaman dan partisipasi yang merata dalam penggunaan SIPEKAT. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi masih memerlukan penjelasan dan pendampingan lebih lanjut dari pengelola kepegawaian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang "Efektivitas E-Government Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis Online (SIPEKAT) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo" hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya keluarga, Pimpinan dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] B. Lubis, "Manajemen kinerja aparatur sipil negara di Indonesia: Sebuah konsep manajemen publik baru," Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, vol. 3, no. 3, pp. 53–60, 2020.
- [2] S. Verdenicci and D. Hough, "People power and anti-corruption: Demystifying citizen-centred approaches," Crime, Law and Social Change, vol. 64, no. 1, pp. 23–35, 2015.
- [3] B. Lubis, "Manajemen kinerja aparatur sipil negara di Indonesia: Sebuah konsep manajemen publik baru," Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, vol. 4, no. 3, pp. 53–60, 2020. [Online]. Available: <https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/315>
- [4] I. Nurdin, D. Qomariah, I. N. Imelda, and Dwiyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- [5] Z. Sun, "Determining human resource management key indicators and their impact on organizational performance using deep reinforcement learning," Scientific Reports, vol. 15, no. 1, p. 5690, 2025. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85218964265>
- [6] M. Bahrin, Manajemen Kepegawaian Negara. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, 2007.
- [7] E. Prasjo and T. Kurniawan, "Reformasi birokrasi dan good governance: Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia," The 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, pp. 1–15, 2008.
- [8] S. Oktavianti, "Revitalisasi sistem informasi manajemen kepegawaian dalam pengelolaan kenaikan pangkat (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo)," Universitas Brawijaya, 2018.
- [9] R. M. Steers, Efektivitas Organisasi, trans. Magdalena Jamin. Jakarta, Indonesia: Erlangga, 2005.
- [10] Suherman, "Efektivitas pelayanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong," 2022. [Online]. Available: <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/view/5194>
- [11] M. T. Ramadyanti and I. U. Choiriyah, "Efektivitas e-government melalui Surat Izin Praktik Online (SIP Online) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo," Archive.umsida.ac.id, 2025.
- [12] N. T. Wandira et al., "Pelayanan kenaikan pangkat melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat: Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo," 2022.
- [13] P. S. Rahmat, "Penelitian kualitatif," Jurnal Equilibrium, vol. 5, no. 9, pp. 1–8, 2009. [Online]. Available: <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- [14] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. USA: Sage Publications, 2014. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- [15] S. Yunengsih and Syahrilfuddin, "The analysis of giving rewards by the teacher in learning mathematics grade 5 students of SD Negeri 184 Pekanbaru," Jurnal Pajar (Pendidikan dan Pengajaran), vol. 4, no. 4, 2020.
- [16] C. N. Sari, M. Heriyanto, and Z. Rusli, "Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga," Program Studi Magister Ilmu Administrasi, vol. 15, pp. 135–141, 2018.
- [17] Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, "Pembangunan desa (Studi kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)," 2017.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.